

BAB I

PENDAHULUAN

Pada tanggal 8 Juni 2006, pemerintahan Jepang mengusulkan satu undang-undang untuk mengubah status Agensi Pertahanan Jepang menjadi Kementerian Pertahanan. Undang-undang ini kemudian diluluskan dengan suara 90% oleh Diet (Parlemen) Jepang baik Majelis Tinggi (*House of Representatives*) maupun Majelis Rendah (*House of Councilors*) pada bulan Desember 2006, dan pada Januari 2007 Badan Pertahanan Jepang secara resmi berubah menjadi Kementerian Pertahanan. Banyak kalangan yang menganggap bahwa hal ini merupakan tanda bahwa Jepang telah kembali menjadi 'normal'. Sebelumnya, Jepang dianggap sebagai sebuah negara yang tidak 'normal' karena Jepang adalah negara dengan pengaruh ekonomi dan politik yang cukup besar, namun tidak ditopang dengan kekuatan militer. Sejak saat Departemen Pertahanan dibentuk kembali, Jepang akhirnya dapat menegaskan kembali pengaruhnya dan memainkan peranan yang lebih besar dan lebih penting di kancah internasional pada umumnya, dan Asia Timur pada khususnya.

Namun, sejumlah pandangan lain menyatakan bahwa 'normalisasi' ini sebenarnya merupakan bagian strategi global Amerika Serikat. Jepang 'normal' karena AS menginginkan hal itu terjadi. Jepang dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang terhadap China dan Korea Utara, dua dari tiga kekuatan komunis terakhir di Asia. Lagi pula, perubahan persepsi ancaman dalam masa perang dingin, pertumbuhan China yang sangat pesat sehingga mengancam dominasi AS

sebagai adidaya tunggal sejak millenium baru mulai, dan kepemimpinan AS dalam kampanye perang melawan teror “*war on terror*”, telah membuat AS kesulitan untuk terus mempertahankan keberadaan pasukannya di berbagai penjuru dunia secara bersamaan. Dampak yang terjadi dari revitalisasi yang dilakukan Jepang ini memiliki jangkauan yang cukup luas, terutama dalam lingkup kawasan Asia Timur. Bagi negara-negara yang ada di kawasan tersebut seperti China dan Korea Selatan secara bersamaan turut mempercanggih dan memodernisasi kekuatan militernya. Perubahan dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga sistem dan kepentingan agar tercipta situasi yang stabil dan kondusif bagi tercapainya kepentingan nasional masing-masing negara.

A. Latar Belakang Masalah

Tata dunia internasional (*world order*) kerap kali berubah ketika terjadi suatu *defining moment* yang dramatis. Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, misalnya, segera diikuti dengan dimulainya era Perang Dingin. Ketika Tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, masyarakat internasional melihatnya sebagai awal dari lahirnya era Pasca Perang Dingin. Runtuhnya gedung *World Trade Centre* (WTC) di New York tanggal 11 September 2001 lalu akibat serangan teroris kini dilihat banyak pihak sebagai *defining moment* yang mengakhiri era Pasca Perang Dingin. Memang, tragedi 11 September membawa implikasi fundamental terhadap situasi dan percaturan politik internasional. Bagi Amerika Serikat Serikat (AS) sendiri, peristiwa tersebut merupakan pukulan telak

bagi supremasi adidayanya, yang menuntut respon dalam bentuk “perang terhadap terorisme.” Bagi negara-negara lainnya, selain menyadarkan mereka bahwa ancaman serius terhadap kemanusiaan dapat terjadi dalam bentuk yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tragedi WTC dan respon AS terhadap terorisme merupakan awal dari terbangunnya sebuah tatanan politik dunia yang ditandai oleh meningkatnya ancaman non-tradisional (khususnya dalam bentuk terorisme) dan hegemonisme AS sebagai adidaya tunggal.

Tragedi peristiwa 11 september 2001, yang menghancurkan gedung WTC merupakan babak baru dalam kebijakan keamanan global pada abad sekarang.¹ Serangan yang dilakukan oleh *non-state actor* membawa dampak yang besar bagi beberapa negara dalam menetapkan kebijakan pertahanan keamanannya dewasa ini. Cakupan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara tidak hanya bertumpu pada potensi konflik atau ancaman dari satu negara kepada negara lain, tetapi sudah menjadi lebih besar dan mencakup keberadaan terorisme dan organisasi kriminal internasional serta masalah lingkungan.

Perubahan tersebut juga terjadi di Asia khususnya kawasan Asia Timur. Peningkatan potensi ancaman terhadap keamanan pertahanan tidak hanya mencakup terorisme global, tetapi juga meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, Selat Taiwan, uji coba senjata balistik dan uji coba senjata dengan hulu ledak nuklir serta peningkatan anggaran belanja pertahanan beberapa negara menimbulkan dampak saling curiga dan tidak mempercayai antar negara dikawasan tersebut. Begitu pula yang terjadi dengan Jepang dan negara-negara

¹ *Japan's New Security Strategy, Japan's Visions for Future Security and Defense Capabilities*, The Council on Security and Defense Capabilities, www.mod.go.jp/e october 2004 hal 3

sekitarnya. Letak geografis Jepang yang berada didalam kawasan sengketa tersebut secara tidak langsung akan menjadi salah satu masukan bagi pemerintah Jepang untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan teritorialnya.

Jepang, sebuah negara kecil yang selama beberapa dasawarsa ini telah menyanggah nama besar. Kehancuran fisik yang dialaminya karena kekalahan dalam Perang Dunia kedua, ternyata tidak turut menghancurkan mental masyarakat Jepang. Dengan semangat dan tekad yang kuat, mereka mampu bangkit kembali dari kehancurannya dan berubah menjadi raksasa ekonomi terbesar kedua didunia setelah Amerika. Dalam waktu yang relatif singkat, bangsa Jepang mampu menyusul kemajuan yang telah dicapai oleh Amerika Serikat.

Bangsa Jepang ternyata mampu menjadikan kekalahan sebagai pelajaran untuk meraih kemenangan. Bahkan mereka memandang kekalahan yang dialami oleh mereka sesungguhnya hanyalah kemenangan yang tertunda. Terbukti bahwa kekalahan yang dialami Jepang tidak menyurutkan langkah mereka untuk tetap menjadikan negaranya sebagai kekuatan dominan di dunia. Kekalahannya secara militer ternyata membuka kesadaran baru bagi pemerintah Jepang untuk menguasai dunia dengan cara memadukan antara kemampuan militer yang tangguh dengan kemampuan teknologi yang canggih dan ditopang dengan kekuatan ekonomi yang bisa menguasai pasar dunia. Dengan langkah baru yang diambil, mereka dapat dengan mudah menguasai dunia, tanpa mengorbankan banyak nyawa secara sia-sia.

Jepang secara kontinyu melakukan perubahan kebijakan pertahanan. Dalam beberapa tahun ini, puncaknya saat parlemen Jepang (Diet) menyetujui

usulan PM Jepang Shinzo Abe untuk membentuk Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang atau *Japan Defence Agency* dan diwujudkan 9 Januari 2007. Sepanjang sejarah pasca-Perang Dunia II sampai sekarang terus berkembang isu kebijakan pertahanan, terutama berkisar pada posisi dan peran Jepang dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan dikawasan Asia Timur. Pasca disetujuinya pembentukan kementerian pertahanan baru di Jepang, langsung terungkap kritik spontan berbagai pengamat dan elit di kawasan Asia terutama dari China, Korea dan beberapa anggota ASEAN dengan rasa khawatir akan mencuatnya kembali kebijakan Asia Timur Raya, semboyan Jepang selama PD II yang wujudnya menyakitkan bangsa Asia pada masa perang tersebut.

Keinginan kuat pemerintah Jepang untuk kembali memiliki struktur sistem pertahanan yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada negara lain muncul semakin besar pasca tragedi WTC 9 September 2001 yang terjadi di Amerika Serikat. Mereka menganggap NPDO (*National Progame Defense Outline*) 1995 yang sudah tidak relevan dengan kondisi dan situasi dunia internasional dan diganti dengan panduan yang baru yaitu NPDG (*National Progame Defense Guideline*) 2005.² Secara umum kebijakan pertahanan yang baru ini memetakan kebijakan pertahanan Jepang 10 tahun ke depan, menitik-beratkan program pembangunan sarana pertahanan jangka menengah, peremajaan alat utama sistem pertahanan, dan rencana formasi struktur pasukan pertahanan. Fokus utama kebijakan pertahanan Jepang yang baru adalah seperti kemungkinan serangan

² Dalam edisi Inggris, nama NPDO diganti dengan NPDG, tetapi dalam bahasa remi Jepang masih menggunakan kalimat yang sama “*Boueikeikaku-no Taikou*”, <http://www.jda.go.jp/j/library/archives/it/index.html>

senjata balistik Korea Utara, China, dan terorisme internasional. Ada beberapa hal menarik dari NPDG 2005, jika pada kebijakan pertahanan tahun 1995 Jepang secara eksplisit menghindari menyebut Korea Utara dan China sebagai ancaman utama, dalam dokumen terbaru kedua negara itu disebut sebagai ancaman militer terbesar Jepang. Bagi Jepang (dan AS), kedua negara itu merupakan *major destabilizing factors* Asia Pasifik. Jepang ingin menjaga keseimbangan kekuatan kawasan.

Sebelumnya pada tahun 1995, seorang pakar khusus masalah Jepang Liu Jianyong mengemukakan bahwa pada saat proposal rancangan operasi PKO (*Peace Keeping Operation*) tahun 1991 diajukan, dia mengatakan “Banyak masyarakat Jepang mencintai perdamaian”.³ Disisi lain, pada tahun yang sama, dalam buku putih pertahanan (NPDG) Jepang disebutkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama adalah rencana pengembangan dan peningkatan kapabilitas pertahanan Jepang untuk beberapa tahun mendatang. Kedua adalah ancaman kawasan teritorial Jepang dari bahaya senjata rudal balistik dan ketiga, konflik semenajung di sekitar wilayah Jepang yang menurut pemerintah Jepang dapat mengancam pertahanan dan keamanan Jepang disamping konflik Jepang dengan negara sekitarnya mengenai klaim atas beberapa pulau. Bila dicermati lebih lanjut, jika sebuah negara menggambarkan ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keamanannya, maka secara otomatis suatu negara tersebut akan berusaha meningkatkan pertahanan keamanannya demi mencapai rasa aman tersebut. Sekali lagi Jepang meningkatkan kemampuan militernya dengan

³ Jian Yang, *China's Security Strategy Towards Japan: Perceptions, Policies and Prospects*, ISBN 1175-1339, Centre for Strategic Studies Victoria University of Wellington, 2001, hal. 8

pembangunan *Theater Missile Defense* (TMD) yang bekerjasama dengan Amerika Serikat.

Fokus berikut merujuk cakupan dan sifat baru tanggung jawab pertahanan Jepang. Kebijakan pertahanan Jepang yang baru menggariskan dua misi utama pertahanan: mempertahankan tanah air dan bekerja sama untuk memelihara perdamaian internasional. Misi ini tampaknya agak kabur. Orientasi kekuatan pertahanan Jepang mengalami perubahan, dari semula bersifat *deterrent effect-oriented* menjadi *response capability-oriented*. Dengan kata lain, Jepang akan ikut berperan aktif dalam berbagai aktifitas pemeliharaan perdamaian internasional dan menjadikan aktifitas tersebut sebagai misi utama JSDF (*Japan Self Defense Force*). Namun, dokumen ini tegas menyatakan, aliansi militer Jepang dan AS adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Sebagai bagian integral modernisasi pertahanannya, Jepang akan menyederhanakan struktur kekuatan pertahanan menjadi *a multifunctional, flexible and effective force*, siap menghadapi ancaman senjata nuklir, kimia, dan biologi.

Memperhatikan perubahan strategis militer Jepang, ada—paling tidak—tiga poin yang perlu dicermati. Pertama, pertahanan baru ini merupakan keinginan kuat Jepang untuk mendapat pengakuan internasional. Jepang ingin dipandang sebagai kekuatan ekonomi sekaligus kekuatan militer dunia. Revisi pasal 9 Konstitusi Jepang menunjukkan keinginan Jepang menjadi “negara normal”. Kedua, perubahan ini juga ingin menunjukkan keinginan Jepang “menjaga jarak” dengan AS dalam aspek pertahanan dan keinginan untuk terlibat lebih aktif dalam kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik. Ketiga, perubahan kebijakan ini

secara jelas ingin menunjukkan rivalitasnya dengan China yang sedang pada titik terendah sejak Perang Dingin berakhir. “Gerakan Anti-Jepang” di beberapa kota besar di China Maret 2005, terkait kian meningkatnya ketegangan hubungan kedua negara. Hal ini terutama disebabkan kekhawatiran China atas kembalinya kekuatan militer Jepang di Asia Timur. Seperti yang dikemukakan oleh Jiang Lifeng, seorang pakar ilmu sosial dari *Chinese Academy of Social Sciences* (CASS) bahwa;

*The distrust between China and Japan on security matters will not disappear in the near future. But for a fairly long period, Japan is unlikely to be a security threat to China ...The possibility of Japan becoming militaristic as it was before the (Second World War) no longer exists.*⁴

Pada analisa yang dijelaskan selanjutnya, jika Jepang meneruskan untuk meningkatkan kemampuan militernya, maka hal itu akan meningkatkan pula kapasitas politik global seiring dengan aktifitas perekonomiannya. Jepang merupakan *super power* dalam bidang ekonomi dengan pertumbuhan yang sangat fantastis pasca kekalahannya dalam PD II dan tidak menutup kemungkinan akan berambisi pada *super power* di bidang yang lain terutama politik dan militer di kancah internasional. Dalam pandangan beberapa kalangan di China, kebijakan pertahanan yang dilakukan Jepang mengisyaratkan bahwa tujuan yang pengekatan militer Jepang oleh *Supreme Commander of Alliance Power* (SCAP) dibawah Mac. Arthur untuk membentuk Jepang seperti switzerland dikawasan timur akan berubah.

⁴ Jian Yang, *Ibid.*

Sebagaimana sebuah konsep negara normal (*normal state*), sebuah negara dinyatakan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut; pertama adalah wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu dengan perbatasan tertentu dengan berlakunya kedaulatan di tempat tersebut. Kedua adalah penduduk, setiap negara mempunyai penduduk yang terjangkau dalam wilayahnya. Dasar suatu negara adalah nasionalisme, sekelompok manusia yang merasa bahwa mereka satu bangsa dan satu cita-cita atau tujuan. Ketiga adalah kedaulatan, yakni hak untuk menentukan nasibnya sendiri, yang mencakup kedaulatan kedalam, yaitu membuat dan menerapkan undang-undang dengan segala cara terhadap wilayah teritorialnya, dan kedaulatan keluar, yaitu, mempertahankan negaranya dari serangan dan ancaman serta memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional.⁵ Untuk mempertahankan unsur-unsur tersebut diperlukan loyalitas mutlak semua warga negara, serta sarana vital kekuatan militer. Dengan kemampuannya mempertahankan dirinya sendiri, yakni unsur-unsur sebuah negara, maka negara tersebut baru bisa dikatakan sebagai negara normal.

Sedangkan konsep *burden sharing*⁶ yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang tersebut merupakan simbiosis mutualisme politik. Jepang menggunakan Amerika Serikat sebagai *bodyguard* atas keamanan nasional Jepang dan tentunya Jepang juga membayar 5% dari GNPnya kepada AS dan AS juga dapat bebas berhegemoni di Asia. Sementara Jepang dapat berkonsentrasi ke

⁵ Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993 hal. 41-45

⁶ Pengertian berbagi beban keamanan pada masa perang dingin dimaksudkan untuk mengantisipasi serangan dari Uni Soviet, sementara Jepang menikmati perlindungan gratis sehingga memacu pertumbuhan ekonominya. Tetapi pada masa sekarang Amerika Serikat menuntut Jepang untuk lebih berperan lebih besar dalam urusan keamanan global untuk menghindari ketidak-wajaran beban keamanan dan tanggung jawab global.

bidang ekonomi tanpa memikirkan keamanannya dan hal tersebut adalah alasan Jepang mengapa Jepang dapat menjadi negara kaya dan aman dari berbagai ancaman di kawasan Asia Timur.

Perubahan fundamental dalam orientasi kebijakan pertahanan Jepang, menimbulkan kontroversi di kawasan Asia Timur. Di satu sisi, perubahan ini adalah hak prerogatif Jepang dalam melindungi dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya, di sisi lain menimbulkan kecurigaan negara-negara tetangga, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Penyebab kecurigaan antara lain, sikap ekspansionis militer Jepang pada Perang Dunia dan aneka kecenderungan memburuknya lingkungan keamanan di kawasan. Tingkat transparansi yang ditunjukkan Jepang dalam kebijakan pertahanan dan kemauan politiknya dalam melibatkan diri secara multilateral dalam berbagai isu keamanan kawasan setidaknya mampu menjadi elemen penting untuk mengurangi tingkat kecurigaan dan persepsi ancaman negara-negara tetangga atas perubahan kebijakan pertahanan Jepang.

Ada beberapa peristiwa yang menandai Jepang melakukan revitalisasi kekuatan militernya pasca tragedi *World Trade Centre* (WTC) 11 September 2001, antara lain; pertama, status kelembagaan pertahanan Jepang. Sebelum disetujui menjadi sebuah Departemen Pertahanan, situasi domestik Jepang masih terjadi perdebatan tentang pengembangan kekuatan pertahanan dikalangan *Diet* (Parlemen Jepang). Partai berkuasa di Jepang LDP (*Liberal Democratic Party*) dengan lebih dari 40 tahun dan mayoritas mempengaruhi setiap kebijakan parlemen masih terus mendapat penolakan dari partai oposisi terbesar yaitu,

The Democratic Party of Japan (DPJ) atas usulan peningkatan tersebut. Tetapi pada akhir tahun 2006 keduanya sepakat dengan suara mayoritas mendukung usulan perubahan status Badan Pertahanan Jepang menjadi kementerian pertahanan yang setidaknya mampu mengatur anggaran dan kebijakannya secara lebih luas dan mandiri.

Bagi pihak aliansi utama Jepang, Amerika Serikat mendukung sepenuhnya perubahan tersebut karena Jepang diharapkan mampu untuk membantu Amerika Serikat serta sebagai koalisi utamanya di kawasan Asia Pasifik. Dukungan tersebut diungkapkan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang Thomas Schieffer yang meminta Jepang meningkatkan anggaran militernya.⁷ Jepang dinilai perlu memodernisasi militer dan segala peralatannya untuk menghadapi berbagai ancaman, termasuk terorisme. Bagi Amerika Serikat saat ini harus menanggung beban berat untuk pertahanan Jepang. Dibawah perjanjian timbal balik kedua negara, Amerika Serikat harus ikut membantu pertahanan Jepang hingga menempatkan sekitar 50.000 tentaranya di Jepang.⁸ Jepang diharapkan tidak hanya menjadi *free rider*, tetapi sudah mampu dan mandiri dengan kekuatan pertahanan dan keamanannya sendiri. Pemerintah Jepang sendiri terus berusaha mempertahankan anggaran pertahanan di bawah 1% dari PDB sebagai respon atas keengganan publik Jepang atas program modernisasi militer. Pada tahun fiskal 2005/2006 yang berakhir 31 Maret, Jepang membelanjakan sekitar ¥ 4,8 triliun.

⁷ *AS Dukung Kuat Militer Jepang*, Kompas, Kamis 15 Maret 2007

⁸ <http://www.kompas.com>

Meski demikian, anggaran pertahanan Jepang termasuk ke empat terbesar di dunia setelah AS, China dan Rusia.⁹

Kedua adalah peremajaan sistem dan peralatan militer. Dalam konstitusi pasifis pasal 9 ayat 2 disebutkan “..... *land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained*”.¹⁰ Tetapi belakangan ini Jepang melakukan peremajaan dan perbaikan komponen pertahanannya. Departemen Pertahanan Jepang yang baru dibentuk, menganggarkan 4,82 trilliun yen (Rp. 374,400 trilliun).¹¹ Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pembuatan sendiri pesawat tempur siluman (Raptor) karena Amerika Serikat melarang pesawat jenis Raptor untuk diekspor dan perbaikan kualitas pesawat tempur F-15. Selain itu Jepang juga menganggarkan untuk pembelian rudal pencegat rudal PAC-3 senilai 9,7 miliar yen, kapal perusak berbobot 5.000 ton, kapal selam dan penyapu ranjau serta helikopter untuk tugas patroli.¹²

Ketiga adalah peran internasional, Jepang yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat pasca Perang Dunia kedua di kawasan Asia. Penjaminan keamanan dan pertahanan Jepang yang dilakukan Amerika Serikat juga merupakan indikasi kedekatan hubungan kedua negara walaupun sempat terjadi sengketa dalam bidang ekonomi beberapa waktu lalu. Perang melawan terorisme yang dilancarkan Amerika Serikat membawa dampak pada tekanan Amerika terhadap Jepang untuk turut serta dalam perang tersebut. Pengiriman pasukan *Self Defense Force* (SDF) ke Afghanistan dan Iraq serta bantuan finansial bagi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *The Constitution of Japan*, <http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html>

¹¹ *Jepang Siapkan Dana Modernisasi Senjata, Sikap permusuhan terhadap china tidak mengendur*; Kompas Sabtu, 1 September 2007.

¹² Kompas Sabtu, 1 September 2007, *Ibid*

berlangsungnya perang tersebut secara tidak langsung turut meningkatkan peran Jepang dalam lingkup internasional dibidang keamanan dan perdamaian.

Sementara pergulatan penafsiran dan revisi konstitusi 1949 bagi beberapa kalangan terutama relevansi pasal 9 jika dikaitkan dengan konteks situasi politik internasional yang terus berubah sampai sekarang masih terus terjadi. Tetapi pemerintah dan partai yang berkuasa (LDP) terus melakukan penafsiran yang lebih terbuka tentang kekuatan pertahanan keamanan Jepang serta peningkatan peran Jepang bagi politik global.

Dengan dilongkarkannya kran pasifis, Jepang terus melakukan perubahan dan peningkatan pertahanan keamanannya serta memberikan keleluasaan untuk beraktifitas dengan perubahan postur militer Jepang ke arah yang lebih fleksibel, termasuk pelonggaran ekspor senjata dan lebih efektif dalam aktifitas menjaga perdamaian internasional, serta memperkuat hubungan AS – Jepang. Jepang mulai muncul sebagai pemain dan melakukan revitalisasi pertahanan keamanan negaranya. Sebagai raksasa di bidang ekonomi dan politik di dunia internasional, tidak menutup kemungkinan Jepang berambisi menjadi lebih kuat dibidang pertahaan keamanan terutama dalam masalah dominasi dan stabilitas kawasan Asia.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu: **“Bagaimana pengaruh revitalisasi militer Jepang pasca tragedi WTC terhadap stabilitas kawasan Asia Timur?”**

C. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah penelitian ini disertai dengan tujuan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Melihat, mencermati dan memahami dinamika perkembangan sistem pertahanan Jepang dan pengaruhnya bagi situasi politik di kawasan Asia Timur
2. Mengaplikasikan teori yang pernah penulis dapat pada saat di bangku kuliah untuk menganalisa masalah yang ada di dunia internasional, khususnya masalah kebangkitan dan perkembangan pertahanan Jepang masa kini.
3. Sebagai masukan bahan wacana bagi dunia internasional.
4. Untuk membuktikan hipotesa penulis.
5. Sebagai syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Teori

Teori di definisikan sebagai serangkaian dari konsep-konsep yang saling berhubungan, bersama-sama dengan definisi-definisi, hukum-hukum, pernyataan-pernyataan dan aksioma-aksioma. Dari hubungan antara beberapa variabel, teori akan menampilkan hipotesa-hipotesa yang bisa memaparkan penjelasan-penjelasan dan membuat prediksi mengenai fenomena tersebut.¹³ Kerangka dasar penulisan ini bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah

¹³ James E. Daugherty & Robert L. Pfaltzgraf. Jr., *Teori-teori Hubungan Internasional*, terjemah oleh M. Amin Rais, Harwanto Dahlan & Tulus Warsito, Yogyakarta, Fisipol UMY, 1994, hal. 26-27

penulisan serta memilih konsep dalam menyusun hipotesa. Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan diatas, penulis menggunakan kerangka teori yang berkaitan erat dengan judul ini yaitu:

D.1. Teori Sistem Umum

Menurut David E. Apter, suatu sistem umum dapat dikatakan lebih merupakan cara untuk mengorganisasikan berbagai variabel dan dipaparkan dalam bentuk keseimbangan.¹⁴ Kemudian dia membagi ciri-ciri sistem umum sebagai berikut:¹⁵

- a. Sistem mempunyai batasan yang didalamnya ada saling hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi.
- b. Sistem terbagi kedalam sub-sub sistem, yang satu sama lain saling melakukan pertukaran.
- c. Sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari dan menerjemahkan masukan kedalam beberapa jenis keluaran.

Pendeknya menurut Apter, dalam suatu sistem ada hubungan antara informasi dan penggunaan energi. Hubungan antara pembuatan kode dan penggunaan energi keluaran – bersifat transformasi. Dengan demikian sistem umum memanfaatkan energi dan masukan informasi, mekanisme kontrol, kantong, peringatan, alat pemeriksa, alat hitung dan keluaran-keluaran yang menghasilkan energi dan informasi baru.

¹⁴ David, E. Apter, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Rajawali, 1977, hal. 391-392

¹⁵ Ibid, hal. 394.

Hal ini didukung oleh Varma dalam bukunya *Teori Politik Modern*, dia membagi teori sistem umum menjadi tiga kategori, yaitu:¹⁶

- a. Konsep yang bersifat deskriptif
- b. Konsep yang mencoba menyoroti faktor yang bertanggung jawab mengatur dan memelihara sistem.
- c. Konsep yang berfokus pada dinamika dan perubahan yang terjadi dalam sistem.

Dengan pembagian kategori tersebut kita dapat mengetahui cakupan suatu sistem dan interaksinya terhadap faktor internal dan eksternal. Sehingga dengan ketiga hal ini, kita juga dapat memanfaatkan pemikiran-pemikiran tentang krisis, tekanan dan ketegangan yang bersifat sistemik dan tentang kemunduran-kemunduran yang terjadi dalam sistem tersebut.

Sedangkan bagi pemikir neorealis kontemporer terkemuka Kenneth N. Waltz dalam Robert Jackson dan George Sorensen, teori sistem yang intinya menfokuskan pada struktur sistem, pada unit-unit yang berinteraksi dan pada kesinambungan dan perubahan sistem.¹⁷ Lebih lanjut menurut Waltz, pada era perang dingin merupakan periode stabilitas dan perdamaian internasional karena sistem bipolar yang di dominasi dua kekuatan besar mampu menyediakan jaminan keamanan dan perdamaian yang lebih baik daripada sistem multipolar. Sehingga dengan adanya interaksi dan komunikasi yang baik antar sistem mampu memberikan kestabilan terhadap sistem itu sendiri.

¹⁶ SP. Varman, *Teori Politik Modern*, terjemah oleh Yohanes Kritiarto, *et. al.*, cet. VI, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 64

¹⁷ Robert Jackson & Goerg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terjemah oleh Dadan Suryadipura, cet I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 110

Menurut Robert J. Lieber, Teori sistem atau teori sistem umum adalah sebuah rangkaian pernyataan tentang hubungan antara variabel independen dan dependen yaitu dengan mengubah satu atau lebih variabel dapat mempengaruhi perubahan pada variabel lain atau kombinasi pada variabel tersebut.¹⁸ Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Anatol Rapoport dan John Burton, sistem adalah sebagai sebuah fungsi menyeluruh dari bagian-bagian yang saling bergantung secara keseluruhan yang terdiri dari hubungan interaksi unit-unit.¹⁹ Sebuah sistem dapat dikatakan seperti sebuah keadaan yang terus berlangsung baik dalam keadaan keteraturan yang baik atau buruk maupun stabil atau tidak stabil. Setiap sistem berusaha untuk membangun, membentuk dan kembali menjadi sebuah keadaan yang seimbang. Asumsi yang dikemukakan oleh Charles A. McClelland, teori sistem adalah sebuah model kerangka interaksi atau kejadian sederhana atau suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengukur dan memeriksa interaksi yang terjadi dalam sistem dan sub-sistem.²⁰ Teori sistem dapat digunakan untuk melakukan analisa atau memeriksa perilaku yang terjadi pada interaksi satu sistem terhadap sistem yang lain.

Untuk membantu mengkonseptualisasikan betapa banyak dan beragamnya sistem dan unit-unit yang berinteraksi, John Lovell seperti dikutip Mohtar Mas' oed, membagi sistem yang memiliki unsur-unsur utama sebagai berikut.²¹

¹⁸ James E. Dougherty & Robert L. Pfaltgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations, A comprehensive survey*, 3rd ed. Chapter 4, New York, Harper Collins Pub. Inc, 1990, hal. 136-137.

¹⁹ *Ibid*, hal. 137

²⁰ *Op. Cit.* hal 149

²¹ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional; Tingkat Analisa dan Teori*, Yogyakarta, PAA-SS-UGM, 1989, hal 117-118

- a. Serangkaian bagian-bagian yang secara bersama-sama mampu melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Hubungan fungsional antar bagian
- c. Hubungan antar sistem dan lingkungannya.

Metode yang paling efektif untuk menggambarkan hubungan antar sistem dengan lingkungannya adalah hubungan timbal-balik yang dinamik. Yaitu lingkungan mempengaruhi sistem, sistem mempengaruhi lingkungan dan lingkungan yang terpengaruh tersebut mempengaruhi sistem itu kembali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lingkungan itu telah diubah oleh suatu sistem.

Selama masa setelah kekalahan di perang dunia kedua hingga masa pasca perang dingin, postur pertahanan Jepang berada dalam kondisi dipertahankan oleh negara lain yang kuat. Setidaknya ada beberapa asumsi dari dalam negeri maupun kalangan internasional yang mendukung Jepang untuk tidak melakukan remilitarisasi kekuatannya. Pertama adalah dominasi militer Amerika atas Jepang yang membuat Jepang merasa aman. Kedua, lemahnya posisi para pengambil keputusan Jepang tentang militer di Jepang dalam mengangkat isu militer. Ketiga, rasio ekonomi Jepang yang turut memberi pembatasan anggaran belanja militer. Keempat, prinsip anti militer Jepang seperti konstitusi anti perang dan tiga prinsip non nuklir yang akan mampu mencegah Jepang kembali menjadi militer. Kelima, pandangan dari negara-negara sekitar Jepang yang menginginkan Jepang tidak memiliki kekuatan militer mengingat ekspansinya pada masa sebelum kekalahan,

dan keenam, kehendak masyarakat Jepang yang sebagian besar menginginkan Jepang tidak tumbuh menjadi militer kembali.²²

Dalam keterjaminan keamanan tersebut dan kuatnya dominasi Amerika di kawasan Asia Timur, stabilitas keamanan kawasan berada dalam situasi yang cukup kondusif, walaupun beberapa konflik masih terjadi. Pecahnya perang Korea yang membagi Korea menjadi dua yang kemudian dilanjutkan dengan program nuklir Korea Utara, sengketa antara Taiwan dengan China daratan, sengketa kepemilikan kepulauan antara Jepang-China, Jepang-Korea dan Jepang-Rusia merupakan sumber konflik yang ada di kawasan Asia Timur. Persepsi tentang negara lain sebagai suatu ancaman yang di kemukakan oleh suatu negara di kawasan Asia Timur dalam dokumen pertahanannya di kawasan tersebut, turut mempengaruhi keharmonisan hubungan bilateral dan multilateral antar negara di kawasan tersebut. Kondisi ini membuat alur atau proses kebijakan masing-masing negara masih dapat berjalan cukup stabil. *Input* dan *output* yang dihasilkan dalam masalah keamanan dan militer masih sebatas tekanan-tekanan untuk saling berlaku transparan. Peran Amerika sebagai *balancer* dan menjaga agar hubungan antara sub-sistem tetap terkendali demi untuk mendapatkan situasi stabilitas yang aman di kawasan Asia Pasifik memang sangat besar.

Pasca tragedi WTC (*World Trade Center*) dorongan dan tuntutan pemerintah Jepang, desakan pemerintah Amerika, situasi keamanan dan sengketa kawasan Asia Timur, dan kondisi politik internasional yang terus berubah merupakan serangkaian *Input* bagi Jepang untuk mengambil kebijakan untuk

²² Peter J. Katzenstein and Nobuo Okawara, *Japan, Asian-Pacific Security, and the Case for Analytical Eclecticism*; *International Security Journal*, Vol. 26, No. 3 Winter 2001/02, hal. 167

meningkatkan kekuatan militernya. Program-program pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas militernya menjadi isu utama yang terus diangkat dalam Diet (Parlemen Jepang). Kebijakan dan tindakan untuk meningkatkan lembaga pertahanan, penyusunan anggaran militer secara mandiri dan mengaktualisasikan serta menginternasionalkan kemampuan pasukan keamanan Jepang menjadi fokus utama dalam NPDG Jepang yang terus diperbaharui merupakan *output* dari teori sistem yang telah dijelaskan diatas.

Perubahan yang dilakukan Jepang dengan *upgrade* kekuatan militernya sebagai suatu unit dalam sistem kawasan, secara tidak langsung mengakibatkan perubahan pula pada unit yang lain. Interaksi yang terjadi antar masing-masing unit dalam lingkup pertahanan keamanan di kawasan merupakan variabel-variabel yang ada dalam suatu sistem. Keberadaan militer Jepang dengan segala perubahan yang terjadi merupakan variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel lain yaitu variabel dependen yang mencakup keadaan pertahanan dan keamanan atau militer negara-negara lain disekitar Jepang. Selain itu ada variabel ekstra yang berada di luar tetapi mempunyai pengaruh terhadap perubahan atau pengukuran dalam lingkungan sistem yang ada.

Hubungan antara dinamika pertahanan Jepang sebagai suatu sub sistem dengan dinamika pertahanan negara lain sebagai sub sistem lainnya di lingkup kawasan Asia Timur, mencakup masalah anggaran, personel, perkembangan senjata dan fasilitas penunjang lainnya. Hubungan tersebut menimbulkan interaksi yang lebih intensif antara masing-masing negara untuk menjaga keamanan dan kedaulatan masing-masing negara. Secara tidak langsung, baik Jepang, China,

Korea Utara dan Korea Selatan terus berusaha menjaga keseimbangan kekuatan dan stabilitas di kawasan Asia Timur.

Uraian diatas menggambarkan upaya sistem politik untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan dukungan dari lingkungan geopolitiknya dan untuk mengendalikan lingkungan itu demi mencapai tujuan sistemnya. Jepang, bagaimanapun juga merupakan bagian dari sistem kawasan Asia Timur yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai macam lingkungan untuk membentuk struktur sistem baru yang baik untuk mencari keseimbangan dan mencapai tujuan dari sistem itu sendiri.

D.2. Konsep Stabilitas

Stabilitas, seperti dalam suatu sistem, tergantung pada suatu negara membentuk keseimbangan dengan negara lain demi mencapai tujuan kepentingannya. Selain membentuk keseimbangan, stabilitas juga memerlukan “*balancer*” kekuatan. Tanpa adanya suatu “*balancer*” tersebut untuk menyeimbangkan dua prinsip atau kepentingan yang berbeda, atau adanya kekuatan yang lebih besar untuk menjaga regulasi kepentingan, suatu sistem tidak akan mampu mencapai tujuannya dan terus berlaku tidak stabil. Seperti yang dikemukakan oleh Kenneth N. Waltz, “*unbalanced relationships are more likely to be unstable than are balanced relationships, and the tension caused by the unbalanced relationships includes a change in interaction behavior*”.²³ Menurut Waltz, kondisi sistem politik internasional bipolar yang terdapat kekuatan besar

²³ Kenneth N. Waltz, *International Structure, National Force, and the Balance of World Power*, Journal of International Affairs, XXI, No.2 1967, hal. 220

dan kekuatan kecil atau ada penyeimbang antara dua atau lebih kekuatan yang berbeda akan lebih baik dari pada sistem politik internasional yang multipolar karena faktor pengganggu stabilitas dapat dikontrol dengan baik.

Untuk mencapai tujuan stabilitas, Louis Cantori dan Steven Spiegel membagi sistem menjadi empat pola, yaitu; pertama, adanya kesatuan tingkatan dan asal usul suatu kawasan, atau adanya kesamaan kepentingan dan hubungan antara masing-masing unit yang saling berinteraksi. Kedua, komunikasi yang terjalin dalam suatu kawasan. Ketiga, tingkat kekuatan yang ada dalam kawasan, dan keempat, struktur hubungan yang ada dalam kawasan tersebut.²⁴

Pola interaksi yang terjadi di kawasan Asia Timur pasca Perang Dunia Kedua hingga sekarang masih memperlihatkan pola hubungan yang kurang harmonis. Masing-masing negara saling mencurigai dan berpandangan bahwa suatu negara merupakan ancaman bagi negara lain. Faktor tersebut menjadikan kawasan Asia Timur merupakan kawasan dengan *Confident Building Measures* (CBM) menempati titik terendah di dunia. Sehingga keberadaan Amerika sebagai *balancer* dengan dominasinya masih sangat dibutuhkan untuk turut menjaga kestabilan kawasan. Isu paling menonjol yang berkaitan dengan stabilitas adalah tingkat kekuatan militer dan belanja pertahanan.

Bagi Jepang dan negara lainnya di kawasan Asia Timur, stabilitas keamanan merupakan hal utama yang harus terus dipertahankan untuk menjamin fungsi-fungsi lainnya. Keamanan jalur pelayaran dan distribusi perdagangan,

²⁴ James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations, A comprehensive survey*, 3rd ed. Chapter 4, New York, Harper Collins Pub. Inc, 1990, hal.163

situasi yang kondusif untuk terus memajukan perekonomian serta peningkatan peran dalam politik internasional membutuhkan situasi lingkungan yang kondusif.

D.3. *Security Dilemma*

Security dilemma dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara. Tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya akan berakibat atau dianggap melemahkan keamanan negara lain.²⁵ Jadi pada dasarnya teori *security dilemma* merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kondisi psikologi para pembuat keputusan yang didasari ketidakpercayaan dan ketidak-tahuan terhadap kemampuan dan atensi pihak lain (musuh). Pertama, ketidak-mampuan semua pihak untuk membedakan antara persenjataan ofensif dengan persenjataan defensif. Kemajuan teknologi yang terus berubah serta kemampuan ekonomi dapat merubah kekuatan ofensif menjadi kekuatan defensif secara relatif cepat oleh suatu negara yang tidak semuanya di ketahui pihak lain. Kedua, ketidak-mampuan untuk mengetahui secara pasti apakah kekuatan persenjataan ofensif lebih baik daripada kekuatan persenjataan defensif. Kekuatan suatu negara selalu berlaku secara kondisional dan rasional, tergantung pada situasi dan kondisi serta terhadap negara mana kekuatan tersebut dipergunakan.

Menurut Barry R. Buzan seperti yang dikutip Amien Rais, definisi tentang dilema keamanan (*security dilemma*) adalah “.....*What one does to enhance*

²⁵ Robert Jervis, *Cooperation Under the Security Dilemma*, dalam Richard K. Betts, *Conflict After the Cold War; Argument on Causes of War and Peace*, Mac Millan Publishing Company, NY, 1994, hal. 315

one's own security causes reactions that in the end can make one less secure".²⁶

Sedangkan menurut John H. Herz dalam Xin Benjian:

*In the anarchic international environment, national states/regions are fearful of each other because of mutual misunderstandings. Security thus becomes the first priority. All countries try to gain security, obtain military superiority, and improve one's own security status by increasing military expenditure. Since an arms race is a perpetual concern, one's military superiority will quickly be surpassed by others military building-up efforts; absolute security is therefore impossible. So all countries are trapped in a dilemma. This kind of phenomenon is called the Security Dilemma.*²⁷

Hal itu senada dengan pernyataan pemerintah Jepang yang tertuang dalam dokumen *Japan's Visions for Future Security and Defense Capabilities*, yaitu;

*A security dilemma arises when one country unilaterally upgrades its own defense capability based on its own military logic and another country, seeing this, reinforces its national defenses, resulting in a further buildup of force. The outcome of this apparently rational behavior on the part of each country is to escalate the arms race, thereby decreasing the security level of each.*²⁸

Sistem internasional dibentuk oleh berbagai kekuatan, yang banyak di antaranya bersifat tetap. Para aliran realisme berpandangan bahwa tidak ada keharmonisan kepentingan yang pokok antara bangsa-bangsa. Sebagai gantinya mereka menyatakan bahwa negara-negara bangsa sering mempertentangkan

²⁶ *Ibid*, hal. 65

²⁷ Xin Benjian; *Security Dilemma, Balance of Power Vs. US Policy Towards China in the Post-Cold War Era*; Journal of the China Institute of Contemporary International Relations, Luoyang, 2001 hal.1 atau dapat dilihat pada John H. Herz, *Idealist Internationalism and Security Dilemma*, World Politics, Vol. 2 (1950), p.157-158; *International Politics in the Atomic Age*, Columbia University Press, 1959, p.231

²⁸ *The Council on Security and Defense Capabilities Report*, Japan's Visions for Future Security and Defense Capabilities, October 2004, hal 5 (<http://www.jda.go.jp/e/index.htm>)

tujuan-tujuan nasional, yang sebagian di antaranya membawa mereka kepada perang.²⁹

Negara harus dan akan menjaga nilai keamanan nasional, yang mencakup perlindungan warga negara dari ancaman internal dan eksternal. Tugas ini merupakan perhatian atau kepentingan fundamental negara-negara. Sebagian besar negara mungkin bersahabat, tidak mengancam dan mencintai perdamaian. Tetapi, sebagian kecil negara mungkin bermusuhan dan agresif, dan tidak ada pemerintahan dunia yang mencegah mereka. Hal itu menimbulkan masalah lama dan mendasar pada sistem negara; keamanan nasional. Untuk menghadapi masalah ini sebagian besar negara memiliki kekuatan militer yang biasanya dianggap sebagai suatu kebutuhan sehingga negara-negara dapat hidup berdampingan dan berhadapan satu dengan yang lain tanpa terintimidasi atau takluk. Sehingga banyak negara turut serta dalam aliansi-aliansi dengan negara lain untuk meningkatkan keamanan nasionalnya. Keamanan nyata-nyata merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam hubungan internasional.

Suatu negara akan merasa terancam dan terpaksa mengambil tindakan lebih lanjut yang dapat memprovokasi tindakan balasan ke negara-negara lainnya, dan demikian seterusnya. “*Security Dilemma*” berarti bahwa spiral atau aksi-reaksi dapat terjadi antara dua negara atau lebih sehingga masing-masing akan mengeluarkan anggaran belanja militer yang terus makin membesar dan ini berarti

²⁹ James E. Daugherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Teori-teori Hubungan Internasional*, terjemah oleh M. Amin Rais, Harwanto Dahlan & Tulus Warsito, Yogyakarta, Fisipol UMY, 1994, hal. 168-169

mereka semakin tidak aman, tetapi justru mendekati ambang perang yang berbahaya.³⁰

Perlombaan senjata jarang menjadi akar penyebab konflik. Keputusan untuk meneruskan atau meningkatkan pembiayaan militer yang sangat tinggi adalah paling sering mencerminkan adanya perselisihan dan konflik dengan pihak lain yang terjadi sebelumnya. Dalam prespektif realis, peningkatan militer adalah konsekuensi wajar dari sistem internasional yang sangat bersifat anarki, yaitu suatu sistem yang terdiri dari negara-negara berdaulat yang bertujuan utamanya untuk mempertahankan diri dan melindungi kepentingan nasionalnya daripada sekedar mempertahankan perdamaian. Negara dan perilakunya tidak dapat dibatasi oleh institusi internasional apapun. Akibatnya setiap negara harus berusaha untuk mempertahankan diri dari ancaman dan serangan negara lain, langkah yang diambil biasanya adalah dengan meningkatkan kekuatan militer, membentuk aliansi militer dan langkah-langkah strategis lainnya.

Peningkatan kekuatan militer dan kepemilikan senjata nuklir bagi China, Korea Selatan dan Korea Utara secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia pasifik, terutama Jepang yang secara historis mempunyai catatan kelam sejarah kekejaman militer Jepang saat melakukan agresi di kawasan tersebut, memaksa pemerintah Jepang untuk memikirkan ulang kebijakan militernya yang selama ini di bawah perlindungan Amerika Serikat. Jepang berusaha melakukan pengembangan kekuatan militernya untuk mengimbangi peningkatan kekuatan militer yang dilakukan negara-negara

³⁰ Amien Rais, *Politik Internasional Dewasa Ini*, Drs. Dya'roni, ed., Surabaya; Usaha Nasional 1989, hal. 68-69.

tetangganya di kawasan Asia Timur, dengan kecenderungan semakin menunjukkan munculnya perlombaan senjata dan persaingan kekuatan militer.

Revitalisasi militer yang dilakukan Jepang untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negaranya dari negara lain mendapat tanggapan dengan meningkat pula anggaran dan kekuatan militer negara-negara di sekitarnya demi menjaga keamanan dan pertahanan negaranya masing-masing. Hal ini terus berlaku jika masing-masing negara terus melakukan peningkatan yang akan memacu meningkat pula anggaran negara lainnya. Konflik teritorial antara Jepang-China, Jepang-Rusia, Jepang-Korea Selatan dan masalah Taiwan, serta sengketa di kawasan Laut China Selatan sampai sekarang belum mencapai penyelesaian yang baik. Di samping itu, masalah kepemilikan senjata nuklir, rudal balistik, anggaran belanja militer dan pembaharuan peralatan tempur yang terjadi di kawasan Asia Timur merupakan peristiwa dilema keamanan paling umum dan banyak terjadi di dunia.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa suatu negara dalam meningkatkan keamanannya menimbulkan reaksi negara-negara lain. Sehingga setiap negara yang melakukan peningkatan kekuatan militer akan cenderung meningkatkan pula kekuatan militernya untuk menciptakan rasa aman bagi negaranya tersebut. Tetapi hal ini yang akan menambah besar potensi perselisihan yang akan menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikannya. Selain itu, dapat juga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang dapat memperuncing hubungan antar negara.

E. Hipotesis

Dari pokok permasalahan yang dikemukakan di atas serta dengan menggunakan kerangka dasar pemikiran yang dipakai maka dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai hipotesis, yaitu:

Revitalisasi militer yang dilakukan Jepang memicu negara-negara disekitarnya untuk meningkatkan kekuatan militer, sehingga berdampak pada menurunnya stabilitas keamanan bagi kawasan Asia Timur.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis, dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang dibuktikan melalui data empiris. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder, yaitu berasal dari literatur-literatur seperti; buku, jurnal ilmiah, majalah, *website*, makalah, skripsi dan koran harian yang memuat data terkait dengan penelitian.

G. Jangkauan Penelitian

Agar penulisan dalam skripsi ini tidak melebar dari permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi lingkup permasalahan mulai pada tahun 2001 ketika terjadi serangan teroris yang menghancurkan gedung *World Trade Center* (WTC) tanggal 11 September 2001 sebagai simbol babak baru bagi situasi

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; dasar metoda teknik*. Tarsito, Bandung, 1994 hal. 131

perdamaian dan keamanan dunia internasional hingga sekarang. Namun bila ada kemungkinan data-data ataupun dokumen-dokumen lain, jika dianggap perlu dan relevan akan dipergunakan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan dan jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II DINAMIKA PERTAHANAN JEPANG PASCA TRAGEDI WTC (*WORLD TRADE CENTER 9/11/2001*)

Dalam bab ini akan diuraikan perubahan, perkembangan dan peningkatan kebijakan pertahanan Jepang yang berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanannya. Untuk memperoleh gambaran secara holistik tentang pertahanan Jepang maka akan dijelaskan landasan, bentuk-bentuk dan tujuan dari peningkatan pertahanan dan keamanan Jepang serta peran Jepang di lingkup kawasan dan internasional pasca tragedi 9 september 2001 dan mengupas sedikit sebelumnya.

BAB III DAMPAK DINAMIKA PERUBAHAN PERTAHANAN JEPANG TERHADAP KAWASAN ASIA TIMUR

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai perubahan sistem pertahanan dan keamanan negara disekitar Jepang yang diakibatkan dari kebijakan yang diambil pemerintah Jepang terkait dengan peningkatan pertahanan keamanannya. Perubahan tersebut berupa dampak atau umpan balik seperti peningkatan anggaran militer, modernisasi kekuatan militer dan meningkatnya persepsi ancaman negaranya dari negara sekitar.

BAB IV SITUASI KONSTELASI KEAMANAN DI KAWASAN ASIA TIMUR

Pada bab ini digambarkan tentang potensi pemicu timbulnya dilema keamanan antara lain masalah modernisasi pertahanan, anggaran militer, konflik teritorial, ancaman senjata pemusnah masal, indikasi meningkatnya perlombaan senjata, dan rendahnya tingkat kepercayaan antar negara.

BAB V KESIMPULAN

Merupakan kesimpulan yang berisi uraian singkat dari bab-bab sebelumnya sekaligus sebagai penutup.

DAFTAR PUSTAKA